

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laba sebelumnya telah banyak dilakukan, namun dengan cara perhitungan yang berbeda-beda menunjukkan hasil yang berbeda-beda pula. Beberapa penelitian mengenai *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laba akan dipaparkan sebagaimana berikut ini.

Penelitian oleh Boediono (2005) dengan judul *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Metode analisis data pada penelitiannya menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen dan variabel endogen berdasarkan struktur model. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengaruh mekanisme *Corporate Governance* dan manajemen laba secara bersama-sama terhadap kualitas laba, teruji dengan tingkat pengaruh yang cukup kuat, sedangkan secara individual Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris, dan Manajemen Laba memiliki pengaruh terhadap kualitas laba yang sangat lemah.

Penelitian oleh Muid (2009) yang meneliti pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kualitas laba yang diprosikan dengan *discretionary accruals*.

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2004-2005 dengan metode *purposive sampling* ini menunjukkan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kawatu (2009) menganalisa Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening, guna mengetahui apakah mekanisme *corporate governance*, yang terdiri kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan, apakah kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan apakah kualitas laba berperan sebagai variabel pemediasi pada hubungan antara *corporate governance* dan nilai perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini, yaitu nilai perusahaan, diproksikan dengan nilai Tobin's Q yang diberi simbol Q dihitung dengan menggunakan rasio Tobin's Q. Sedangkan variabel intervening, kualitas laba, dihitung dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi, yaitu *Discretionary accruals* (DACC). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, mekanisme *corporate governance* mempengaruhi kualitas laba. Mekanisme *corporate governance* tersebut terdiri dari: (1) kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba, (2) dewan komisaris secara

negatif berpengaruh terhadap kualitas laba, (3) Komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba. Kedua, kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ketiga, mekanisme *corporate governance* secara statistik berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Mekanisme corporate governance yang terdiri dari: (1) kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (2) dewan komisaris secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan (3) komite audit secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keempat, kualitas laba bukan merupakan variabel pemediasi (*intervening variabel*) pada hubungan antara mekanisme *corporate governance* dan nilai perusahaan.

Penelitian oleh Khafid (2012) dengan judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba, yang merupakan penelitian dengan menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *board composition* (komposisi dewan komisaris), komite audit, *shareholder by manager/director* (kepemilikan manajerial), dan institusional investor terhadap persistensi laba. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan adalah regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Komposisi dewan komisaris terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba, perusahaan yang memiliki komposisi dewan komisaris independen lebih banyak cenderung memiliki laba yang sustainable. Kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial

berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang semakin besar, semakin meningkat persistensi labanya, dan cenderung memiliki laba yang *sustainable*. Komite audit terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. Dengan demikian, keberadaan para pemilik saham institusional tidak dapat memberikan pengaruh langsung terhadap persistensi laba.

Penelitian oleh Tohir dan Yuyetta (2012) yang berjudul *Pengaruh Struktur Corporate Governance Pada Kualitas Laba Dengan Intellectual Capital Disclosure Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2012)*, dengan variabel independen struktur *corporate governance* yang terdiri dari komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan dengan variabel dependen yakni kualitas laba dimana kualitas laba ini diukur dengan menyelidiki tingkat akrual diskresioner. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis maka dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama, tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Namun kepemilikan institusional secara independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. Secara independen komposisi komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. *Intellectual capital disclosure* bukan merupakan variabel *intervening* dalam hubungan struktur *corporate governance* terhadap kualitas laba pada perusahaan perbankan pada tahun 2010-2012.

Penelitian Tuwentina dan Wirama (2014) yang menganalisa Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Good Corporate Governance* Pada Kualitas Laba pada perusahaan yang listing di BEI dan masuk pemeringkat *Corporate Governance Perception Index* atau CGPI periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 55. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Proksi pengukuran kualitas laba yang digunakan adalah ERC, konservatisme akuntansi diukur dengan indeks konservatisme, sedangkan *Good Corporate Governance* diukur dengan indeks CGPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi mendapatkan respon yang positif dari investor berdasarkan laba yang disajikan. Sedangkan variabel lain yaitu *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh pada kualitas laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Menurut Brigham & Houston (2006: 26-31) dalam Retno dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Sedangkan *agency theory* menurut Scott (2003) dalam Tertius dan Christiawan (2015) adalah kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini, dengan prinsip utama yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.

Menurut Narolita & Krisnadewi (2016), perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pendelegasian otoritas memang menjadi sebuah keharusan dalam hubungan keagenan ini untuk memungkinkan agen mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada prinsipal. Namun sebaliknya, manajer sebagai agen juga mempunyai dorongan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Hal ini disebabkan karena para manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri karena

mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategik, taktikal dan operasional.

Agency theory diasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingannya sendiri-sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan prinsipal dan kepentingan agen (Rifani, 2013).

Dengan adanya motivasi untuk mementingkan diri sendiri tersebut dan dengan adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh agen, hal ini memberikan kesempatan bagi agen untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal.

Potensi terjadinya konflik kepentingan ini menurut penelitian Indriastuti (2012) merupakan akibat dari kondisi dimana agen sebagai pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi dari pada prinsipal dikarenakan prinsipal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara terus-menerus dan berkala sehingga prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen. Kondisi tersebut membuat prinsipal tidak dapat merasa pasti bagaimana usaha agen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan, situasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi.

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Rifani, 2013). Hal inilah yang menjadi faktor pemicu bagi agen untuk melakukan tindakan dalam rangka mengolah angka-angka akuntansi tersebut agar dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan

kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut biasa disebut dengan *earnings management*.

Menurut pendapat Widiatmaja (2010), Penerapan *earnings management* yang didasarkan pada tujuan untuk mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh agen mengakibatkan adanya sifat manajemen yang melaporkan laba secara oportunistik untuk kepentingan pribadinya. Apabila hal semacam ini terjadi pada perusahaan maka akan menyebabkan informasi laba yang dilaporkan menjadi diragukan kualitasnya.

Adanya asimetri informasi ini berpotensi untuk dapat memicu timbulnya biaya agensi. Menurut Sudarama dan Putra (2014), berpendapat bahwa, biaya keagenan dapat terjadi dalam pemisahan kepemilikan dan pengelolaan karena kepentingan yang tidak konsisten dari manajemen dan pemegang saham. Sedangkan definisi dari *agency cost* menurut Rifani (2013), merupakan jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Sangat kecil kemungkinan bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Agency cost atau biaya agensi/keagenan dapat dibagi menjadi 3 komponen, antara lain:

1. Biaya monitoring (*monitoring cost*), Pengeluaran biaya yang dirancang untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer;

2. Biaya bonding (*bonding cost*), Pengeluaran biaya yang timbul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham;
3. Kerugian residual (*residual cost*), merupakan kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan (*monitoring*) dan penjaminan (*bonding*) telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan atas pemisahan kepentingan dapat mengakibatkan konflik, yang mana dalam upaya mengurangi terjadinya hal tersebut diperlukan suatu mekanisme dan peraturan pengendalian yang mampu menjadi arahan bagi kegiatan operasional perusahaan (Boediono, 2005). *Corporate Governance* merupakan mekanisme yang dipercaya yang dapat mengendalikan dan mengawasi tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan yang mungkin dilakukan oleh agen.

2.2.2. Good Corporate Governance (GCG)

2.2.2.1. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

GCG atau *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Commite* pada tahun 1992 yang didefinisikan dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*, yaitu bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem yang fungsinya adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada para *shareholders* pada khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Definisi lain tentang *Good Corporate Governance* yaitu dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 yang menyatakan bahwa GCG merupakan suatu proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN guna meningkatkan keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dimana pada penerapannya dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan *shareholders* dan *stakeholders* di suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan keharmonisan serta meminimalisir potensi terjadinya pengelolaan perusahaan yang salah maupun penyalahgunaan aset perusahaan yang mungkin dapat dilakukan oleh manajer.

2.2.2.2. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Adanya tata kelola yang baik diharapkan bahwa perusahaan akan dinilai dengan baik oleh stakeholders.

Sedangkan menurut Hindarmojo (2002) penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. Corporate Governance yang baik dapat memberikan rangsangan

bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien (Andypratama dan Mustamu, 2013).

2.2.2.3. Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG)

Berkembangnya kesadaran akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan, maka perlu adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.

Menurut William dan Mustamu (2013), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Dalam berbisnis sangat diperlukan bagi perusahaan untuk menjaga objektivitasnya, maka dari itu perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, maka perusahaan harus dikelola secara benar, terukur

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari dua indikator yaitu basis kerja dan audit.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan *Good Corporate Citizen CSR (Corporate Social Responsibility)* dan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundangundangan.

4. *Independensi (Independency)*

Keberhasilan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* didukung dengan adanya pengelolaan perusahaan yang independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi. Ada dua indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang

terjadi dalam perusahaan ada dua indikator yang bisa dilihat yaitu *shareholder* dan *stakeholder*.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang ada, diharapkan perusahaan bisa berjalan sesuai peraturan secara efektif dan efisien, sehingga kinerja perusahaan menjadi optimal.

2.2.2.4. Manfaat dan Faktor Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan akan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut apabila diterapkan dengan benar.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *Good Corporate Governance* (Maksum, 2005) antara lain:

1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
2. Mengurangi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajer dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan nilai perusahaan bagi investor sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan.
4. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin satu, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham dan juga nilai dividen yang akan diterima. Bagi Negara, akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

5. Dalam praktiknya, karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
6. Meningkatnya kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan sehingga citra positif perusahaan akan naik.
7. Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, hal ini disebabkan manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Keberhasilan atas penerapan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Maksud dari faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan.

Beberapa faktor internal pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* (Maksum, 2005) diantaranya adalah:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan,
2. Praturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan merujuk pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*,

3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*,
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi,
5. Adanya transparansi informasi bagi publik sehingga kalangan publik dapat mengikuti bagaimana perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (Maksum, 2005), antara lain:

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor *public* atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
 - a. Berkembangnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *Good Corporate Governance* secara sukarela.

- b. Hal lain yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* yaitu adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2.2.2.5. Mekanisme Good Corporate Governance

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Pengertian GCG menurut Zarkasyi (2008:12) dalam Febriani (2016), menyatakan bahwa GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) demi tercapainya tujuan perusahaan. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan tujuan bersama yang ditetapkan.

Dalam kaitannya, mekanisme *Corporate Governance* menurut Syakhroza (2002) dapat diartikan sebagai Suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Sementara menurut Rafifah (2015), mekanisme *Good Corporate Governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu prosedur yang berguna untuk mengendalikan perusahaan dalam tujuannya untuk memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan *stakeholders* secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang.

Ada empat mekanisme *Good Corporate Governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *Good Corporate Governance*, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan keberadaan komite audit. Sama halnya dengan penelitian ini, guna mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laba, digunakan empat dimensi mekanisme *Good Corporate Governance* diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan keberadaan komite audit dengan rincian penjelasan sebagaimana berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah seberapa besar kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan saham beredar perusahaan (Tarjo, 2008). Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor *non* instusional.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektifitas pengelolaan perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan oleh reaksi pasar atas pengumuman laba oleh perusahaan. Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian atas tindakan manajer dengan lebih baik dibanding dengan investor individual melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan.

Peranan pemilik institusi dalam *Good Corporate Governance* adalah:

1. Mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis dimana mereka menanamkan dananya;
2. Sebagai sumber informasi perusahaan;
3. Memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Herianto, 2013).

Proporsi kepemilikan saham oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, hal ini dijelaskan ketika manajer juga menjabat sebagai pemegang saham maka mereka akan menyejajarkan kepentingan manajemen dengan

pemegang saham yang nantinya manajer tersebut juga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambilnya serta menanggung sendiri kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Aida, 2004).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Puteri dan Rohman (2012) yang menyatakan bahwa tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan namun dengan pelaporan yang tidak sebenarnya yaitu tidak dapat mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan.

Dengan adanya kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka potensi terjadinya manajemen laba yang dapat berdampak buruk pada kualitas laba perusahaan akan berkurang dan manajemen cenderung akan lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

3. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya (Hasanah 2011).

Untuk memastikan komisaris independen dapat menjalankan tugasnya secara independen, terdapat beberapa kriteria formal yang harus dipenuhi oleh komisaris independen (Hastuti, 2011), yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*);
2. Tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya;
3. Tidak memiliki kedudukan rangkap di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
4. Harus mengerti perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Bebas dari segala kepentingan bisnis atau hubungan lain yang dapat diinterpretasikan akan menjadi penghambat kemampuan untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.

4. Komite Audit

Standar akuntansi yang semakin ketat dengan berbagai tuntutan pengungkapan di seluruh dunia turut berperan dalam mendorong reformasi *Good Corporate Governance*. Dalam rangka penyelenggaraan *Good Corporate Governance*, Bursa Efek Indonesia mewajibkan perusahaan *go public* yang tercatat untuk memiliki komite audit di perusahaannya. Hal ini dikarenakan komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan (Herianto, 2013).

Komite audit juga bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Selain itu, peran penting lainnya yang dipegang oleh komite audit adalah sebagai penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dengan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir sehingga laporan lebih akurat (Herianto, 2013). Oleh karena itu, perunya pemahaman tentang akuntansi dan keuangan bagi para Komite Audit didukung dengan adanya surat edaran Bapepam nomor SE-03/PM/2000 tanggal 2 Mei 2000, yangmana Bapepam mensyaratkan pembentukan Komite audit pada perusahaan publik Indonesia agar memiliki setidaknya tiga orang komite audit dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang Komisaris Independen eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai keuangan dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan.

Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif akan meningkatkan *control* terhadap perusahaan sehingga potensi terjadinya konflik keagenan yang timbul akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraanya sendiri dapat ditekan.

2.2.3. Kualitas Laba

Menurut Suwardjono (2006:463) dalam Khafid (2012), menyatakan bahwa kualitas laba akuntansi ditunjukkan oleh "kedekatan atau korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomik". Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Hodge (2003:37) dalam Paulus (2012), yang mendefinisikan kualitas atas laba sebagai "*the extent to which net income reported on the income statement differs from "true" (unbiased and accurate) earnings*".

Pendapat lain tentang kualitas laba yaitu dari Amilin (2008) yang menyatakan bahwa kualitas laba dapat ditentukan dengan mengacu pada nilai laba yang dilaporkan menunjukkan seberapa besar laba tersebut dapat menghasilkan uang kas bagi perusahaan. Pendapat tersebut kemudian didukung dengan pendapat dari Wibowo (2009) yang mengungkapkan bahwa laba tahun berjalan memiliki kualitas yang baik jika laba tersebut menjadi indikator yang baik untuk laba masa mendatang, atau berhubungan secara kuat dengan arus kas operasi di masa mendatang (*future operating cash flow*).

Menurut Schipper dan Vincent (2003), konstruk kualitas laba dan pengukurannya dapat dikelompokkan berdasarkan cara menentukan kualitas laba. Empat kelompok penentuan kualitas laba ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada sifat runtun-waktu laba, kualitas laba meliputi: persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi), dan variabilitas. Atas dasar persistensi, laba yang berkualitas adalah laba yang persisten yaitu laba yang berkelanjutan, lebih bersifat permanen dan tidak bersifat transitori. Dalam hal ini, laba yang berkualitas tinggi diasumsikan laba yang mempunyai

kemampuan dalam memprediksi laba di masa yang akan datang. Berdasarkan konstruk variabilitas, laba berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai variabilitas relatif rendah atau laba yang *smooth*.

2. Berdasarkan pada hubungan antara laba, kas, dan akrual, dapat diukur dengan berbagai ukuran yaitu: rasio kas operasi dengan laba, perubahan akrual total, *discretionary accruals* dan estimasi hubungan akrual kas. Dengan menggunakan ukuran rasio kas operasi dengan laba, kualitas laba ditunjukkan oleh kedekatan laba dengan aliran kas operasi. Besaran laba yang tidak jauh berbeda dengan aliran kas operasi mengindikasikan laba yang semakin berkualitas. Dengan menggunakan ukuran perubahan akrual total, laba berkualitas adalah laba yang mempunyai perubahan akrual total kecil. Selanjutnya, keeratan hubungan antara akrual dan aliran kas juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba. Semakin erat hubungan antara akrual dan aliran kas, semakin tinggi kualitas laba.
3. Berdasarkan pada Konsep Kualitatif Rerangka Konseptual (*Financial Accounting Standards Board, FASB, 1978*). Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen, yaitu laba yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas/konsistensi.
4. Berdasarkan pada keputusan implementasi meliputi dua pendekatan. Pendekatan pertama, kualitas laba berhubungan negatif dengan banyaknya estimasi dan prediksi oleh penyusun laporan keuangan, yang mana apabila semakin banyak estimasi yang diperlukan oleh penyusun laporan keuangan

dalam mengimplementasi standar pelaporan, maka akan semakin rendah kualitas laba, begitu juga sebaliknya. Pendekatan kedua, kualitas laba berhubungan negatif dengan besarnya keuntungan yang diambil oleh manajemen dalam menggunakan pertimbangan agar terjadi manajemen laba yang menyimpang dari peraturan, yang mana apabila manajemen laba semakin besar akan mengindikasikan kualitas laba yang semakin rendah, dan sebaliknya.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba

Menurut penelitian oleh Tohir (2013), mengatakan bahwa Investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap kualitas laba, maka semakin tinggi kepemilikan institusional akan meningkatkan pengelolaan laba.

Hasil penelitian Muid (2009), menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer pada suatu perusahaan diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laba. Hal ini dikarenakan dengan memiliki peran sebagai pemilik, maka manajer akan memiliki cara pandang yang sama dengan para pemilik lainnya seperti stakeholder dan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan principal. Dengan adanya kondisi tersebut maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan akan menghindari laporan keuangan dari terjadinya manipulasi data yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Tohir 2013).

Berdasarkan pada hasil penelitian Muid (2009) yang meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba yang diaproksikan dengan *discretionary accruals*, menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accrual*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba

Dengan adanya keberadaan dewan komisaris Independen di perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dikarenakan fungsinya yaitu untuk membatasi tingkat manajemen laba dengan melakukan pengawasan atas operasional perusahaan dan pelaporan keuangan, sehingga jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan. Dengan peningkatan

pengawasan oleh dewan komisaris independen maka akan menjadikan semakin rendahnya penggunaan discretionary accruals, yaitu meningkatnya kredibilitas dan transparansi informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, hal ini secara otomatis berdampak pada peningkatan kualitas laba perusahaan (Tohir, 2013).

Hasil penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kualitas laba yang dilakukan oleh Boediono (2005) dengan menggunakan analisis jalur, juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H3: Keberadaan dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.3.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba

Komite audit memiliki hubungan erat dalam kaitannya dengan nilai perusahaan dan kualitas laba perusahaan, dimana komite audit memiliki tugas yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Berdasarkan fungsinya tersebut diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen dalam melakukan manajemen laba. Komite audit dapat mengurangi aktivitas manajemen laba yang tidak sehat yang dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan, yaitu salah satunya adalah kualitas laba (Isti'adah, 2015).

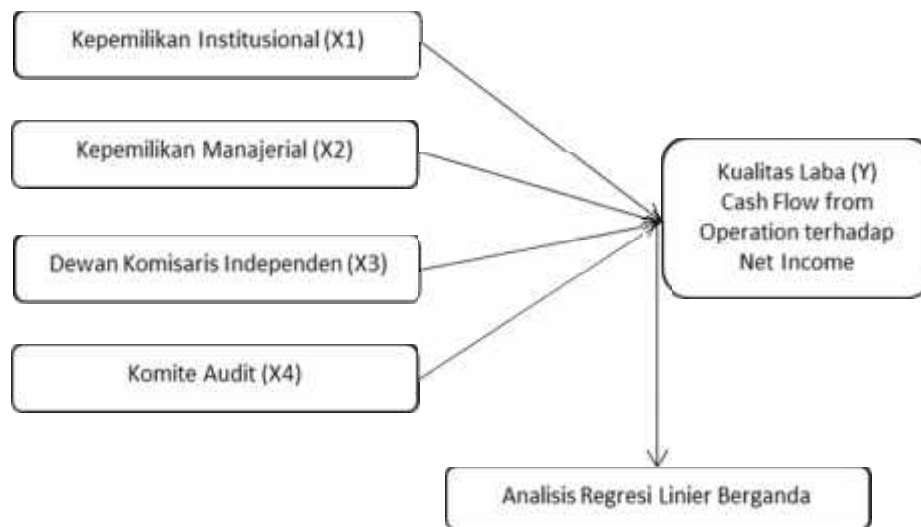
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Isti'adah (2015) tentang pengaruh GCG terhadap kualitas laba, menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H4: Komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya yang sudah diuraikan, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Dalam alur kerangka konseptual tersebut terdapat 4 (empat) variabel independen yang terdiri dari X1 Kepemilikan Institusional, X2 Kepemilikan manajerial, X3 Dewan Komisaris Independen, X4 Komite Audit serta variabel dependen yaitu Y Kualitas Laba, yang diukur dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda sendiri menurut Mudrajad (2003:215) memiliki

fungsi yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dari kerangka konseptual tersebut, dapat dilihat beberapa hipotesis yang muncul, sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kualitas laba.

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba.

H3: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kualitas laba.

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap kualitas laba.